



Dewan Soroti Pengurangan Bobot Nilai KMS

UMBULHARJO (MERAPI) - Usulan perubahan parameter Kartu Menuju Sehat (KMS) diminta dicermati ulang. Pasalnya bobot nilai di beberapa parameter mengalami penurunan dibandingkan parameter lama. Jika bobot nilai parameter itu berkurang, peluang warga miskin untuk masuk dalam daftar penerima KMS semakin kecil.

"Pada dasarnya kami sepakat parameter KMS diubah untuk disesuaikan dengan kondisi terkini. Tapi kami meminta dicermati ulang karena ada beberapa parameter yang bobot nilainya berkurang," kata anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Budi Utomo, usai rapat dengan Dinas Sosial terkait perubahan parameter KMS, Selasa (27/2).

Dwi Budi menyampaikan, parameter yang bobotnya berkurang di antaranya terkait pendapatan rata-rata anggota keluarga setiap bulan dari sebelumnya berbobot nilai 12, pada draf parameter yang baru nilainya hanya 10. Sedangkan pada aspek pangan parameter keluarga tidak mampu memberi makan kali tiap hari, bobot nilainya turun dari 9 menjadi 6.

Selain itu, dari aspek pendidikan pada parameter lama terdapat tanggungan anggota keluarga yang sekolah SLTA ke bawah. Pada parameter yang baru diubah menjadi keluarga yang memiliki tanggungan anggota keluarga bersekolah SLTA lebih dari satu orang.

"Padahal itu masuk parameter yang sifatnya pokok. Kalau bobot nilainya berkurang, potensi keluarga miskin untuk mendapat total nilai yang memenuhi parameter KMS akan turun," tambahnya.

Dia menyebut dalam rapat itu pihak Dinsos Kota Yogyakarta belum dapat menjawab alasan pertimbangan penurunan bobot nilai beberapa parameter pokok KMS. Pasalnya penentuan bobot nilai parameter baru itu, lanjutnya, ditentukan berdasarkan kajian dari akademisi.

Pihaknya juga menyarankan agar penerima KMS tahun 2018 yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat untuk diusulkan masuk basis data terpadu (BDT) penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat. Total ada 55.000 jiwa KMS tahun 2018 tapi masih ada sekitar 20.000 jiwa yang belum masuk daftar penerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Tahun ini Kota Yogyakarta mendapatkan tambahan kuota PKH sekitar 10.000 jiwa.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Dinsos Kota Yogyakarta Bejo Suwarno mengatakan ada tujuh parameter KMS yang diubah di antaranya soal pendapatan dan aset. Pada parameter lama, pendapatan keluarga miskin sebesar Rp 300.000-400.000, dinaikkan menjadi Rp 423.815. Sedangkan tagihan listrik per bulan yang awalnya kurang dari Rp 50.000 diubah menjadi Rp 75.000. Namun bobot nilainya berubah.

"Perubahan parameter itu ditentukan oleh pihak ketiga. Perubahan parameter itu masih bisa disempurnakan kembali jika ada masukan-masukan. Rencananya perubahan parameter ini dipakai untuk pendataan KMS 2019 yang dimulai Juni-Agustus," tutur Bejo.

Jumlah penerima KMS tahun 2018 ditetapkan sebanyak 17.253 kepala keluarga (KK) atau 55.094 jiwa. Diakuinya dari data KMS 2018 itu yang masuk dalam BDT penanggulangan kemiskinan di pemerintah pusat sebanyak 33.432 jiwa. Pihaknya akan mengupayakan dengan parameter baru itu akan disesuaikan dengan BDT karena BDT tidak ada skor penilaian seperti KMS. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2.			
3.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005